



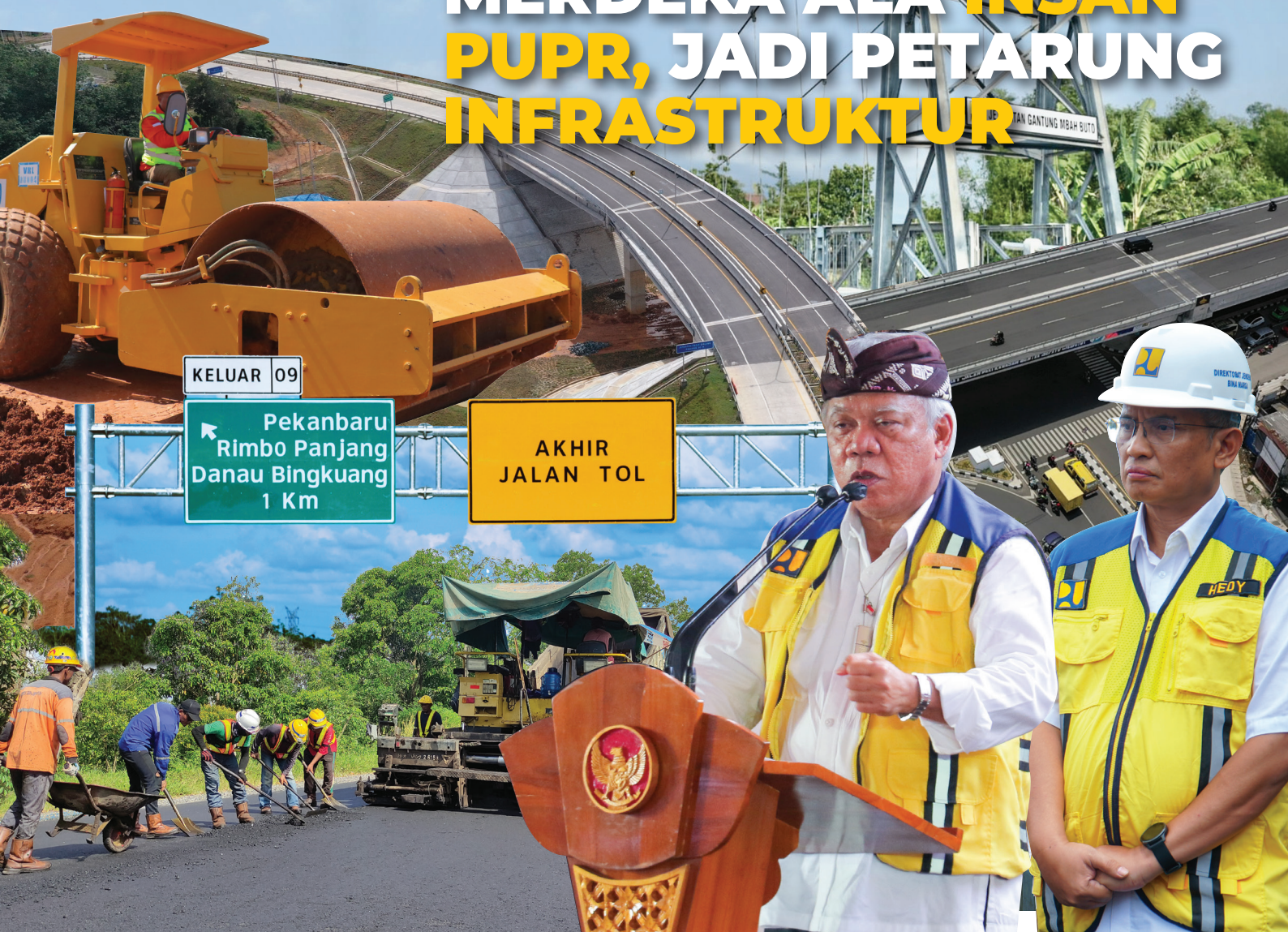
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Edisi 28 | 2022

buletin **Bina Marga**

M e n y a m b u n g N e g e r i

**MERDEKA ALA INSAN
PUPR, JADI PETARUNG
INFRASTRUKTUR**



Optimalisasi
Anggaran 2022-2023
di Tengah
Tahun Politik

Insan PUPR Siap
Jadi Petarung
Pembangunan
Infrastruktur

Capaian
Pembangunan Tol
dan Rencana Aplikasi
MLFF



foto: Flyover Kopo, Bandung

buletin **Bina Marga**

Menyambung Negeri

Pelindung
Direktur Jenderal Bina Marga

Pemimpin Umum
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga

Dewan Redaksi
Para Direktur di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Marga
Kepala BPJT
dan Sekretaris BPJT

Pemimpin Redaksi
Kabag Hukum & Komunikasi Publik

Redaktur Pelaksana
Sub Koordinator Komunikasi Publik

Redaksi
Girly Kurniati
Riko Dwiputra
Angelia A.W
Hasian LT

Kontributor
Kabag / Kasubag TU BB/BPJN
di lingkungan Ditjen Bina Marga

Fotografer
Bambang Ismanto

Desain / Tata Letak
Sarotona Zega
Imam Warmanto

Administrasi
Wulandari Wurjanti

Tata Usaha
Martina Piranti

f @puprbinamarga

🐦 @pupr_binamarga

📺 pupr_binamarga

📷 pupr_binamarga

🎵 @pupr_binamarga

Merdeka Ala Insan PUPR, Jadi Petarung Infrastruktur

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa instansinya telah merealisasikan pagu anggaran 2022 sebesar Rp47,79 triliun atau 41,07% dari total anggaran Rp116,37 triliun. Sedangkan progres fisik sebesar 46,94%. Capaian ini dihitung per 23 Agustus 2022.

Sedangkan pagu anggaran 2023 sebesar Rp125,2 triliun. Dari nilai tersebut, bidang jalan dan jembatan mendapat bagian sebesar Rp49,3 triliun. Ada banyak program namun, pemerintah dan DPR sepakat untuk mempertahankan program infrastruktur berbasis kemasyarakatan atau program padat karya (PKT).

Terkait penggunaan anggaran di tahun ini dan tahun depan, Ditjen Bina Marga sepakat untuk mengikuti prinsip Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Pihaknya akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. Seluruh pekerjaan konstruksi tuntas pada 2023 atau selambat-lambatnya awal 2024.

Tidak mudah untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur, oleh karena itu setiap insan PUPR diminta untuk siap menjadi petarung pembangunan infrastruktur. Hal itu disampaikan Basuki di hadapan jajarannya saat menjadi Inspektur Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77.

Insan PUPR diharapkan tetap fokus menjalankan amanah, jangan lengah dengan capaian. Data menunjukkan, sepanjang 2500 km jalan tol sudah beroperasi. Pada tahun 2022 ini tambahan 43 km jalan tol juga akan dioperasikan. Jika mengacu pada Renstra kita di tahun 2022-2024, maka 1545 km jalan tol harus sudah dioperasikan. Sehingga nanti pada 2024, minimal 4000 km jalan tol sudah beroperasi.

Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian menyadari bahwa capaian ini juga punya konsekuensi. Salah satunya adalah bagaimana mempertahankan kualitas infrastruktur yang telah dan akan beroperasi. Untuk itu, pihaknya terus meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk menjamin keselamatan dan keamanan para pengguna jalan tol.

Salah satu peningkatan SPM adalah dengan menerapkan teknologi. Menurut Sekretaris BPJT Triono Jasmono, akhir tahun ini akan dijalankan uji coba pembayaran non-tunai di gerbang tol melalui *Multilane Free Flow* (MLFF). Diharapkan MLFF dapat menekan kerugian tersebut karena memangkas waktu antrian saat membayar tarif tol.

Tidak hanya ke dalam, peningkatan layanan juga merangkul dan berkolaborasi dengan institusi lainnya. Dalam hal ini Ditjen Bina Marga mendukung Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Menurut Hedy, pihaknya telah menerapkan kebijakan baru dalam pembangunan Jalan Nasional, yakni perancangan jalan tanpa menggunakan lintasan sebidang.

"Ini sudah kita laksanakan. Bisa dilihat di setiap jalan lingkaran yang baru atau *bypass* kita buat lintasan tak sebidang," kata Hedy.

Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca!

MARGA UTAMA

- 5** Optimalisasi Anggaran 2022-2023 di Tengah Tahun Politik
- 9** Infografis: Arahan Presiden dan Tindak Lanjutnya

MARGA KHUSUS

- 10** Insan PUPR Siap Jadi Petarung Pembangunan Infrastruktur



12

- 12** Capaian Pembangunan Tol dan Rencana Aplikasi MLFF
- 15** Upaya Ditjen Bina Marga Wujudkan Berkeselamatan di Perlintasan Sebidang
- 17** Kartun
- 18** Kementerian PUPR Tingkatkan Pengawasan Standar Pelayanan Jalan Tol
- 19** Infografis: Teknologi MLFF
- 20** Infografis: Survei Penilaian Integritas

MARGA INFO

- 21** Kementerian PUPR Dukung Pemeriksaan Laporan Kinerja oleh BPK
- 22** Tol Serang-Panimbang Buka Akses Wisata Warga Jakarta ke Banten
- 23** Optimalisasi Anggaran, Dirjen Bina Marga Dorong Penerapan *Value Engineering*
- 24** Perbaikan Jalan *Bypass* Banjarmasin Menggunakan Teknologi Kearifan Lokal

- 25** Menteri Basuki Minta Jaga Kualitas Jalan Tol Jagat Kerthi Gilimanuk-Mengwi

- 27** Presiden Resmikan Tol Cibitung-Cilincing dan Serpong Balaraja Seksi I



25

MARGA INOVASI

- 28** Ini Dia Teknologi Canggih di Proyek Tol Pekanbaru-Bangkinang 40 Km

MARGA DAERAH

- 30** Ekonomi Warga Desa di Jombang Terangkat Setelah Jembatan Gantung Mbah Buto Selesai
- 31** Jembatan Shortcut Yeh Otan Untuk Tingkatkan Konektivitas Denpasar-Gilimanuk
- 32** Konten Media Sosial Ditjen Bina Marga Harus Kredibel



33

- 33** Flyover Kopo Berhasil Urai Kemacetan Setelah Resmi Beroperasi
- 34** Flyover Patih Galung Diharapkan Bisa Atasi Kemacetan di Kota Prabumulih

Optimalisasi Anggaran 2022-2023 di Tengah Tahun Politik

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan pagu anggaran 2022 sebesar Rp47,79 triliun atau 41,07% dari total anggaran Rp116,37 triliun. Sedangkan progres fisik sebesar 46,94%. Capaian ini dihitung per 23 Agustus 2022.



Foto: Aceng Sofian - Tol Jembatan Cikubang Cipatat Kab. Bandung Barat

Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. "Pagu awal Kementerian PUPR tahun 2022 itu Rp100,59 triliun, saat ini menjadi Rp116,37 triliun mengalami penambahan," kata Basuki.

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp2,29 triliun. Dana itu di antaranya untuk pembangunan daerah irigasi Slinga, peningkatan daerah irigasi air Manjuto, dan pembangunan jalan serta jembatan.

Selain dari hasil penerbitan SBSN, tambahan pagu anggaran PUPR pada 2022 juga datang dari pinjaman utang luar negeri sebesar Rp5,01 triliun yang di antaranya digunakan untuk rehabilitasi irigasi, pariwisata, dan *national global water supply*, serta program perumahan.

Peningkatan anggaran juga bersumber dari rupiah murni Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atau Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebesar Rp8,48 triliun. Berikut rinciannya, Rp2,67 triliun dibelanjakan untuk mendukung acara berskala internasional seperti KTT G20, ASEAN Summit, dan gelaran MotoGP. Kemudian, sekitar Rp710 miliar untuk untuk penanganan bencana alam di Jawa Timur, Sulawesi Barat, NTT, NTB, dan Banten.

Di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan dukungan infrastruktur jalan dan jembatan di Bali untuk mendukung Presidensi Indonesia dalam KTT G20 meliputi preservasi Jalan dan Jembatan Simpang Pesanggrahan-Nusa Dua, Jimbaran-Uluwatu dan penataan lansekap Bundaran, pedestrian dan median ruas Jalan Bandara Ngurah Rai-venue. Selanjutnya peningkatan Jalan Simpang Siligita-Kempinski dan *showcase* mangrove.

“Untuk dukungan jalan dan jembatan di Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp391,68 miliar. Berdasarkan *e monitoring* Kementerian PUPR pada 29 Agustus 2022 progres keuangan sudah 42,63% dengan progres fisik mencapai 75,62%,” kata Hedy Rahadian saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI.

Selanjutnya dukungan konektivitas di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) DKI Jakarta dengan anggaran Rp127,68 miliar progresnya sudah mencapai 78,79% untuk penyerapan keuangan dengan realisasi fisik 97,88%. Secara keseluruhan penanganan jalan dan pedestrian di kawasan TMII sepanjang 5,5 km yang dikerjakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni Paket 1 dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk sepanjang 3,6 km dan Paket 2 dilaksanakan oleh PT Nindya Karya (Persero) sepanjang 1,9 km.

Penanganan jalan dan pedestrian TMII tidak hanya mengutamakan kualitas mutu pada konstruksi, tetapi juga keindahan serta memprioritaskan fasilitas bagi kaum difabel. Misalnya pedestrian lebar dan tidak terputus serta terdapat *guiding block* (jalur pemandu), dipasang lampu penerangan jalan, lampu sorot *outdoor*, dan tanaman untuk memperindah lanskap. Selain itu trotoar juga dilengkapi dengan bangku/kursi serta tempat sampah untuk menambah kenyamanan pengunjung ketika berwisata di TMII.

Dukungan konektivitas lainnya adalah peningkatan dan pembangunan akses menuju Sirkuit Mandalika yang menjadi tempat penyelenggaraan MotoGP di NTB. Anggaran pembangunannya sebesar Rp359,73 miliar dengan progres keuangan 65,15% dan konstruksi 79,62%.

Selanjutnya peningkatan dan pembangunan jalan Labuan Bajo menuju Tana Mori sepanjang 25 km untuk mendukung penyelenggaraan ASEAN Summit di NTT. Pekerjaan fisik jalan dimulai pada Januari 2022 dengan menyesuaikan standar internasional lebar 7 m, 2 lajur, 2 arah dan *row* 23 m.

Pekerjaan jalan Tana Mori menggunakan anggaran APBN senilai Rp487,16 miliar yang dibagi dalam 5 segmen dan 4 jembatan sepanjang 175 m. Segmen 1 peningkatan struktur Jalan Labuan Bajo - Simpang Nalis sepanjang 6.15 km serta Jembatan Nanganane dan Jembatan Wae Mburak, Segmen 2 pembangunan Jalan Simpang Nalis - Simpang Kenari sepanjang 6.50 km, Segmen 3 Jalan Simpang Kenari - Warloka sepanjang 5.10 km dan Jembatan Wae Kenari, Segmen 4 Jalan Warloka -

Simpang Tana Mori sepanjang 4.25 km dan Jembatan Soknar, dan Segmen 5 peningkatan Jalan Simpang Tana Mori menuju Desa Golomori sepanjang 3 km.

Progres penanganannya sudah mencapai 55,92% dengan penyerapan keuangan 41,42%. Kementerian PUPR berharap setelah ruas jalan ini terhubung, nantinya jarak dari Labuan Bajo menuju Tana Mori dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1 jam sehingga membuat waktu tempuh menjadi efisien dan memperbanyak aksesibilitas bagi wisatawan yang berkunjung di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara juga mendapat sokongan dari dana ini, yakni sebesar Rp5,1 triliun. Alokasi IKN Nusantara diperuntukkan proyek Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA sebesar Rp110 miliar. Sementara untuk Ditjen Cipta Karya, PUPR mengalokasikan sebesar Rp2,3 triliun. Ditjen Perumahan mendapat dana Rp480 miliar. Kemudian untuk bidang Ditjen Bina Konstruksi, PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp0,04 triliun.

Selanjutnya, sebanyak Rp2,11 triliun dari tambahan anggaran IKN itu dipakai untuk pembangunan bidang Bina Marga. Dalam hal ini Ditjen Bina Marga akan membangun jalan kerja logistik, jalan di dalam KIPP, pelebaran ruas jalan dari simpang IKN sampai Sp. Riko, jembatan Pulau Balang bentang pendek, tol duplikasi jembatan bentang pendek Pulau Balang, jalan *bypass* pasar Sepaku, serta pembangunan dermaga.

Program Padat Karya Tunai

Dalam satu kesempatan, Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah program infrastruktur berbasis kemasyarakatan atau program padat karya (PKT).

“Terkait dengan peningkatan alokasi anggaran dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2022, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah alokasi program infrastruktur berbasis masyarakat,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022.

Kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk pencapaian target prioritas nasional dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu kegiatan PKT harus terus ditingkatkan sampai tahun depan.

Menurut Lasarus, Komisi V DPR RI bersama dengan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari

hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, padat karya juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok,” katanya.

Pada kesempatan RDP Komisi V Rabu, 31 Agustus 2022, Dirjen Hedy menuturkan bahwa realisasi Program PKT Ditjen Bina Marga tahun anggaran 2022 sebesar 34,12% atau Rp1,4 triliun dari total pagu Rp4,3 triliun. Sedangkan realisasi tenaga kerja yang terserap mencapai 85% atau 48.498 orang dari total target pagu sebesar 57.056 orang.

Terkait program non rutin, Hedy yang juga didampingi 33 kepala balai dan balai pelaksanaan itu mengatakan bahwa hingga 13 September 2022, realisasi pekerjaan fisik padat karya non rutin yang sudah dilaksanakan sebesar 60,71 pekerjaan dengan serapan tenaga kerja 7.003 orang atau sebesar 272.940 Hari Orang Kerja.

“Program padat karya bidang jalan dan jembatan diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi mengalami penambahan jumlah pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19, misalnya di Pulau Jawa,” kata Hedy.

Selain pekerjaan padat karya non rutin, Dirjen Bina Marga juga terus melanjutkan kegiatan padat karya rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Yakni, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase. Saat ini ketiga lingkup pekerjaan tersebut telah menyerap 44.272 tenaga kerja yang tersebar di 1.383 lokasi.

Untuk PKT rutin preservasi jalan, misalnya pembersihan median jalan dan pengecatan marka, progres fisik sudah mencapai 62,07% dengan capaian penyerapan tenaga kerja sebanyak 24.495 orang. PKT rutin pemeliharaan jembatan misalnya pengecatan rangka jembatan progres fisiknya 60,24% dengan capaian menyerap 7.975 tenaga kerja.

Dari kegiatan revitalisasi drainase jalan nasional yang tersebar di 186 lokasi telah mencapai progres fisik 74,02% dan menyerap 11.802 tenaga kerja. Pekerjaan pembenahan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan. Sebagai bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tersebut.

Anggaran 2023 dan Prioritasnya

Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp125,2 triliun.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR, Kamis, 8 September 2022.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Di kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengatakan di TA 2023 instansi yang ia pimpin akan menerapkan prinsip Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Pihaknya akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. Seluruh pekerjaan konstruksi tuntas pada 2023 atau selambat-lambatnya awal 2024.

“Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024,” kata Basuki.

Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun; Bidang permukiman Rp25 triliun; Bidang Perumahan Rp6,9 triliun; Dan bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,3 triliun.

Di tahun 2023 pembangunan jalan nasional ditargetkan sepanjang 489,1 km. Lalu pembangunan/duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km antara lain ruas Geumpang – Pameue (Aceh), Lahewa Afulu – Bts. Nias (Sumut), dan Teluk Tapang – Bunga Tanjung (Sumbar).

Dalam rangka OPOR, di bidang jalan dan jembatan pada tahun 2023 dilaksanakan preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 30,4 km, dan peningkatan aksesibilitas *flyover/underpass/terowongan* sepanjang 2,2 km. Beberapa aksesibilitas tersebut di antaranya *flyover* Sekip Ujung (Sumsel), Gelumbang (Sumsel), dan Aloha (Jatim), revitalisasi drainase dan jembatan gantung, serta program padat karya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mengalokasikan program padat karya tahun 2023 sebesar Rp14,34 triliun yang ditargetkan akan menyerap 712.000 tenaga kerja. Program padat karya bidang jalan dan jembatan dialokasikan sebesar Rp4,78 triliun dengan target dapat menyerap 80.000 tenaga kerja melalui pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin jembatan, dan revitalisasi drainase.

Ada satu hal yang ditekankan Menteri Basuki untuk saat ini dan ke depan, yakni pihaknya berkomitmen dalam mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Menurutnya PDN sangat penting untuk menjaga roda ekonomi nasional melalui pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, Kementerian PUPR mematok minimal 90% penggunaan PDN dari pagu anggaran.

Hal lain yang juga dipegang Kementerian PUPR dalam upaya menjalankan perintah Presiden adalah pembangunan infrastruktur harus fokus pada aspek kualitas dan aspek lingkungan. Juga memanfaatkan keunggulan teknologi informasi, antara lain sistem

e-monitoring, e-katalog sektoral, teknologi BIM (*Building Information Modelling*).

Terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, “Hingga pertengahan Agustus 2022, realisasi belanja penggunaan PDN sebesar Rp44,61 triliun atau sebesar 42,99% dari target Rp103,78 triliun,” kata Basuki.

Dari progres tersebut, Menteri Basuki menyebutkan sejumlah infrastruktur Kementerian PUPR yang telah diresmikan dari Januari hingga Juli 2022, pertama untuk Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air (SDA) di antaranya Bendungan Randugunting Jawa Tengah (Jateng), Bendungan Bintang Bano di NTB, dan Embung Sumingkir di Jateng.

“Di bidang Jalan dan Jembatan, antara lain Jembatan Gantung Girpasang di Jateng, Jalan Bypass-Balige (KSPN Danau Toba), Jembatan Ploso Jawa Timur (Jatim), dan Jalan Lingkar Brebes-Tegal di Jateng,” tambah Basuki.

Dengan waktu tersisa, Dirjen Hedy mempercepat realisasi anggaran 2022 melalui: mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran; mengupayakan buka blokir *automatic adjustment* I untuk kegiatan mendesak; mempercepat proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan IKN termasuk pendanaannya; mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian (meningkatkan monitoring/ pengawasan, menyelesaikan masalah tanah, dll).

Lalu juga mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran; Mempercepat pemanfaatan pagu tidak terserap untuk program prioritas mendesak; Dan terakhir adalah mempercepat solusi kenaikan harga bahan bakar minyak dan aspal.

Menurut Hedy, beberapa kontrak pembangunan infrastruktur terpaksa ada yang putus atau bergerak lambat. Penyebab utamanya adalah badan usaha enggan menyepakati kontrak karena di lapangan terjadi kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan aspal. Harganya sudah tidak lagi sesuai saat proses lelang.

Supaya progres pembangunan tetap berlangsung, maka Ditjen Bina Marga telah mengusulkan adanya penyesuaian harga. Posisi saat ini sudah dirapatkan di tingkat Menteri Koordinator dan mereka pada prinsipnya setuju.

“Kami masih menunggu masalah ini dinaikkan di ratas. Penyesuaian harga tidak menambah anggaran tetapi dari optimalisasi sisa lelang dan kegiatan yang dibatalkan. Semoga kami dapat payung hukumnya dari ratas untuk kami tindaklanjuti,” tutur Hedy.

ARAHAN PRESIDEN

- 01** Seluruh pekerjaan konstruksi **tuntas pada 2023** atau selambat-lambatnya **awal 2024**
- 02** Pembangunan infrastruktur harus **fokus pada aspek kualitas dan aspek lingkungan**
- 03** Tahun 2022 adalah awal dari tahun **politik**, sudah terasa, dan tensi politik akan terus mengalami eskalasi hingga 2024

PESAN KHUSUS

- 01** Manfaatkan produk dalam negeri (TKDN)
- 02** Manfaatkan keunggulan teknologi informasi, antara lain sistem e-monitoring, e-katalog sektoral, teknologi BIM (Building Information Modelling)



Insan PUPR Siap Jadi Petarung Pembangunan Infrastruktur

Menuju ujung tahun 2022 pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bahkan, di tahun 2023, infrastruktur tetap menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta jajarannya untuk siap menjadi petarung.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Hal itu diungkap Basuki saat upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR, Rabu, 17 Agustus 2022.

Basuki yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan bahwa ajakannya untuk menjadi pejuang pembangunan infrastruktur tidak lepas dari agenda besar yang telah digariskan oleh Presiden untuk tahun 2023. Menurut Presiden, APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama. Hal disampaikan saat Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya di Depan

Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2022.

Agenda pertama adalah penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial;

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi;

Ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi

birokrasi dan penyederhanaan regulasi; Keempat, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis pada ekspor; Dan kelima mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Prioritas pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur tampak dari rencana anggaran infrastruktur sebesar Rp392 triliun pada RAPBN 2023. Angka itu naik 7,75% dari anggaran tahun ini sebesar Rp363,8 triliun.

Menurut Presiden, anggaran itu akan diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; Mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; Menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; Serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.

“Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/ lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan,” ujar Presiden.

Selaras dengan agenda Presiden, maka Menteri Basuki menegaskan bahwa pihaknya serius dalam menyelesaikan tiap pembangunan infrastruktur yang telah dipercayakan kepadanya dan tentu ke semua insan PUPR.

Dari total anggaran infrastruktur tersebut, dana sebesar Rp125,2 triliun diamanahkan pada Kementerian PUPR. Tujuannya tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja tapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan pendapatan sebesar-besarnya sehingga bisa mendukung daya beli masyarakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia.

Menteri kelahiran Surakarta 67 tahun itu juga mengevaluasi capaian kinerja Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan amanah sebagai penanggung jawab infrastruktur di Indonesia.

“Sepanjang 2500 km jalan tol sudah beroperasi, dan pada tahun 2022 ini tambahan 43 km juga akan dioperasikan. Jika mengacu pada Renstra kita di tahun 2022-2024, maka 1545 km jalan tol harus sudah dioperasikan. Sehingga nanti pada 2024, minimal 4000 km jalan tol sudah beroperasi,” terang Basuki.

Adapun ruas jalan tol yang akan dioperasikan tahun ini meliputi jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi Cileunyi-Pamulihan, lalu Binjai-Langsa seksi Binjai-

Stabat, kemudian Manado-Bitung seksi Danowudu-Bitung serta Sigli-Banda Aceh seksi Seulimeum-Jantho.

Tak lupa, Basuki juga menyinggung program padat karya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman serta perumahan. Pada tahun ini, program padat karya di Kementerian PUPR menargetkan penyerapan 688.000 tenaga kerja serta anggaran sebesar Rp13,76 triliun. Dengan realisasi mencapai 50,37% dan 316.563 tenaga kerja.

Menuju tahun politik, Basuki tidak bosan untuk memegang prinsip OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi) dalam bekerja. “Dalam rangka penyelesaian infrastruktur pada tahun 2023-2024, program-program di PUPR adalah OPOR, yaitu pengoperasian prasarana yang sudah dibangun, pemeliharaan bagi prasarana yang sudah beroperasi supaya dapat berfungsi secara berkelanjutan, lalu optimalisasi fungsi dari infrastruktur yang sudah dibangun, dan rehabilitasi bagi prasarana yg sudah tidak berfungsi. Sehingga pembangunan baru tidak ada kecuali merupakan perintah Presiden.”

Mengingat waktu yang semakin dekat dengan akhir pemerintahan, ditambah 5 agenda penting dari Presiden untuk tahun 2023, maka tak heran Basuki menuntut jajarannya untuk menjadi petarung di bidang infrastruktur. Harapannya, tugas percepatan pembangunan infrastruktur bangsa dapat dituntaskan dengan baik.

“Insan PUPR harus menjadi petarung yang tangguh, kuat, berintegritas, berani dan berjiwa seni. Karena peran kita sebagai petarung dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tegas Basuki.



Foto: Oky Lukmansyah - Jalan Tol Trans Jawa Pejagan Pemalang

Capaian Pembangunan Tol dan Rencana Aplikasi MLFF

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus mempercepat pembangunan sejumlah jalan tol di berbagai daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar daerah sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat



Foto: Angga Bhagya N - Gerbang Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengungkapkan, ruas jalan tol yang beroperasi pada tahun 2020 hingga Agustus 2022 mencapai 453,12 km. Sedangkan ruas jalan tol yang direncanakan terbangun atau beroperasi pada September 2022 hingga tahun 2024 sepanjang 1.014 km. Artinya, pembangunan jalan tol selama tahun 2020-2024 totalnya 1.450 km.

“Pada tahun 2022 ditargetkan operasional 19 ruas jalan tol sepanjang 283,15 km. Hingga Agustus 2022, 6 ruas jalan tol baru sepanjang 84,15 km sudah dioperasikan. Sedangkan sisanya sebanyak 13 ruas lainnya sepanjang 199 km ditargetkan tuntas hingga akhir Desember 2022,”

kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu, 14 September 2022.

Hedy menjelaskan 6 ruas jalan tol yang sudah beroperasi tersebut yakni ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 1 (11,4 km), ruas Binjai-Langsa Seksi 1 (11,8 km), ruas Manado-Bitung Seksi Danowudu-Bitung (13,43 km), ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 2 (6,35 km), ruas Cibitung-Cilincing Seksi 2 dan 3 (24,45 km), dan ruas Taba Penanjung-Bengkulu (16,73 km).

Sedangkan 13 ruas lainnya yang ditargetkan operasional hingga Desember 2022 yaitu ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 2-6 (49,3 km), ruas Ciawi-Sukabumi Seksi

2 (11,9 km), ruas Semarang-Demak Seksi 2 (16,3 km), ruas Cibitung-Cilincing Seksi 4 (7,7 km), ruas Cimanggis-Cibitung Seksi 2A (3,5 km), ruas Cinere-Cimanggis Seksi 3 (5,5 km), dan ruas Serpong -Cinere Seksi 2 (3,6 km).

Kemudian ruas Bekasi-Cawang-Kp. Melayu Seksi 1A dan 2A (6,6 km), ruas Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (8,5 km), ruas Serpong-Balaraja Seksi 1A (4 km), ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 5 dan 6 (12,5 km), ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 1 dan 2 (38,5 km), dan ruas Padang-Pekanbaru (31 km).

“Untuk tol Cisumdawu, Seksi 2 sedang tahap penyelesaian, kita harapkan akhir Oktober 2022 sudah bisa kita operasikan hingga Seksi 3 Cimalaka. Sedangkan Seksi 4-6 kita harapkan selesai paling lambat Desember 2022 karena tol ini sudah lama ditunggu oleh masyarakat untuk mengurangi *travel time* dari Bandung hingga Kertajati,” kata Hedy.

Capaian dan target pembangunan jalan tol ini tidak main-main. Berdasarkan buku Informasi Statistik Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.100 km hingga tahun 2019.

Selama 1978-2014, pembangunan jalan tol di Indonesia mencapai 802 km. Sementara, pada era kepemimpinan Jokowi 2015-2019, panjang jalan tol yang dibangun mencapai 1.298 km. Jumlah ini tentu akan semakin bertambah karena ditargetkan pada tahun 2020-2024 akan ada tambahan ruas tol sepanjang 1.450 km.

Capaian ini mendapat apresiasi dari Komisi V DPR RI atas pelaksanaan pembangunan Jaringan Jalan Tol. Pembangunan jaringan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Indonesia.

“Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan BPJT agar meningkatkan pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan Tol demi terwujudnya pelayanan jalan yang andal dan prima serta pengawasan terhadap BUJT agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol demi keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol,” ungkap Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, ketika membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga, Kepala BPJT dan BUJT, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu, 14 September 2022.

Penuhi SPM dan Implementasi Teknologi

Namun demikian, Hedy menyadari bahwa capaian ini juga punya konsekuensi. Salah satunya adalah bagaimana mempertahankan kualitas infrastruktur yang telah dan akan beroperasi. Untuk itu, pihaknya terus meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk

menjamin keselamatan dan keamanan para pengguna jalan tol.

SPM yang dimaksud adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.

Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Terkait dengan pemenuhan SPM, Hedy meminta BUJT untuk meningkatkan patroli rutin dan memasang kamera pengawas serta alat mengukur batas kecepatan kendaraan. “Kementerian PUPR juga meminta seluruh operator jalan tol untuk meningkatkan patroli rutin untuk menemukan adanya potensi gangguan terhadap pengoperasian jalan tol dan lalu lintas di sepanjang koridor ruas tol sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang berlaku,” kata Hedy dalam satu kesempatan di Jakarta, Senin, 19 September 2022.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, pihaknya telah meminta para BUJT untuk memperbanyak pemasangan kamera CCTV dengan kerapatan yang memadai.

“Saat ini sedang dalam proses pemasangan kamera-kamera *monitoring* kecepatan di seluruh ruas tol, termasuk pemasangan kamera CCTV. Kita meminta BUJT untuk memasang *speed camera* untuk memonitor kecepatan,” ujar Danang.

Selain itu, Danang mengatakan BUJT juga diminta untuk memperbanyak pengawasan dan meningkatkan kecepatan reaksi terhadap kondisi-kondisi khusus, seperti dampak asap pembakaran sawah/ ladang karena berpotensi membahayakan pengguna jalan tol.

Konsekuensi lain dari meningkatnya infrastruktur jalan tol adalah meningkatkan pelayanan dengan mengimplementasikan teknologi. Saat ini, BPJT Kementerian PUPR juga memiliki aplikasi “BPJT INFO” berbasis *mobile smartphone* yang memiliki bermacam fitur pendukung teman perjalanan berkendara. Aplikasi ini mencakup informasi seputar *rest area* dan layanannya, informasi CCTV di jalan tol untuk memantau lalu lintas secara *real time*, update informasi dan pemberitaan jalan tol, layanan *call center* 24 jam, dan juga terkoneksi dengan aplikasi info tol para BUJT.

Menurut Sekretaris BPJT Triono Jasmono, penerapan teknologi harus diperluas karena penerapan sistem tol elektronik (*e-toll*) di jalan tol seluruh Indonesia yang berlangsung saat ini ternyata masih menyebabkan kerugian sebesar Rp4,4 triliun per tahun. Hal ini karena

masih ada antrian lebih kurang lima detik saat pengguna jalan melakukan *tapping* kartu untuk pembayaran non-tunai di gerbang tol.

Untuk itu, BPJT berencana untuk menerapkan *Multilane Free Flow* (MLFF). Penerapan teknologi tersebut merupakan bentuk inovasi dan transformasi digital di jalan tol dengan konsep *intelligent toll road system* (ITRS) yang mengacu pada Teknologi Toll Road 4.0. Diharapkan MLFF dapat menekan kerugian tersebut karena memangkas waktu antrian saat membayar tarif tol.

Triono mengatakan, secara garis besar inovasi teknologi MLFF merupakan suatu terobosan layanan transaksi di jalan tol tanpa sentuh yang dilakukan secara otomatis melalui aplikasi di *smartphone* menggunakan sistem *server based* dengan teknologi *Global Navigation Satelit System* (GNSS) dan data kendaraan dikenali menggunakan satelit.

"Nantinya, saat teknologi MLFF mulai diimplementasikan para pengguna jalan tol dapat melakukan pembayaran non-tunai tanpa tap kartu, yakni hanya dengan mengunduh dan mendaftarkan data pribadi pada aplikasi bernama Cantas pada *smartphone* masing-masing yang telah terkoneksi internet. Kemudian setelah kalkulasi tarif terkoneksi pada aplikasi, uang dari masing-masing

instrumen pembayaran milik tiap pengguna juga akan berkurang otomatis," papar Triono, Senin, 11 September 2022.

Dikatakan Triono, MLFF akan mulai diujicobakan di beberapa ruas tol pada akhir tahun 2022. "Saat ini kita tengah fokuskan tahap pengembangan aplikasi Cantas, finalisasi proses pemasangan *gantry* dan perangkat kamera sehingga semua tahapan bisa segera tuntas dan berjalan dengan baik sebelum diimplementasikan dan digunakan masyarakat secara bertahap pada bulan Desember 2022. Selanjutnya akhir tahun 2023 mendatang akan diimplementasikan secara keseluruhan di seluruh jalan tol di Indonesia."

Perangkat yang digunakan pada transaksi nirsentuh MLFF adalah berupa *Electronic On-Board Unit* atau dikenal dengan E-OBU. Dengan sistem tersebut, pengguna jalan tol memperoleh efisiensi biaya operasi dan juga mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan.

"Harapan kita ke depan dalam pelaksanaan transaksi digital di jalan tol seluruhnya dapat berbasis *digital payment* mulai dari bayar tol, membeli makan dan keperluan di *rest area* yang hanya menggunakan satu *smartphone* untuk semua transaksi," ujar Triono.



Foto: Ari Wibisono - Jalan Tol Jorr TB Simatupang

Upaya Ditjen Bina Marga Wujudkan Berkeselamatan di Perlintasan Sebidang

Jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang semakin banyak tiap tahunnya. Harus ada usaha dari banyak pihak untuk bisa menekan jumlah kecelakaan, termasuk dari Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Menurut data PT Kereta Api Indonesia (KAI) sepanjang tahun 2021 jumlah kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api sebanyak 271 kecelakaan dengan korban meninggal 67 orang dan luka 92 orang. Data tahun ini dari PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, sudah ada 95 kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api mulai Januari hingga Juni 2022.

Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian sepakat untuk menekan jumlah kecelakaan. Dari pihaknya, hal yang bisa dilakukan adalah menerapkan kebijakan baru dalam pembangunan Jalan Nasional, yakni perancangan jalan tanpa menggunakan lintasan sebidang.

"Ini sudah kita laksanakan. Bisa dilihat di setiap jalan lingkar yang baru atau *bypass* kita buat lintasan tak sebidang," kata Hedy dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR yang juga dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemhub, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI), di Jakarta, Rabu, 14 September 2022.

Kebijakan baru tersebut, sambung Hedy, sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 91 (1) tentang perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Aturan lain, PP No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dalam salah satu butirnya menyebutkan pembangunan perpotongan tidak sebidang untuk Jalan Nasional dilakukan oleh

kementerian yang membidangi urusan jalan berdasarkan permintaan Menteri. Sementara untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan permintaan gubernur dan bupati/walikota.

Selain itu, hingga 2022 Bina Marga telah mengubah perlintasan sebidang menjadi tak sebidang antara jalur kereta api dan Jalan Nasional di 49 titik. Total biaya yang telah dikeluarkan sebanyak Rp21,45 triliun. Empat proyek di antaranya selesai pada tahun 2017, yaitu *flyover* Kesambi sepanjang 446,5 m, *flyover* Kretek sepanjang 788,5 m, *flyover* Klonengan sepanjang 760 m, dan *flyover* Dermoleng sepanjang 617,5 m. Sementara *underpass* Karangsawah sepanjang 850 m rampung pada tahun 2018. Lima infrastruktur tersebut terletak di Provinsi Jawa Tengah.

Tahun 2023, Bina Marga merencanakan penanganan perlintasan jalur kereta api di empat titik, yaitu *flyover* Gelumbang sepanjang 700 m di Provinsi Sumatera Selatan, *flyover* Aloha sepanjang 858 m di Provinsi Jatim, *underpass* Joglo sepanjang 450 m di Provinsi Jateng, dan *flyover* Nurtanio sepanjang 937 m di Provinsi Jabar. “*Flyover* Nurtanio ini untuk mendukung infrastruktur Kereta Cepat Jakarta Bandung,” jelas Hedy.

Capaian tersebut menyisakan 150 titik perlintasan sebidang yang belum ditangani dengan estimasi kebutuhan biaya sangat besar. Hedy mengatakan anggaran rata-rata yang dibutuhkan untuk membangun

lintas sebidang seperti sebuah *flyover* atau *underpass* mencapai Rp150 miliar. Artinya, untuk menuntaskan 150 titik perlintasan sebidang maka pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp300 triliun.

“PUPR punya *problem* dengan *budget constraint* ini. Kalau kebutuhan keseluruhan Rp300 triliun ini akan menjadi angka yang tidak realistis,” terang Hedy.

Untuk itu, Hedy menyarankan beberapa hal lain untuk mengurangi angka kecelakaan di lintasan sebidang ini. Pertama, menggiatkan penjaga di setiap perlintasan sebidang. “Lalu mempersiapkan *early warning system*, penggunaan dan peningkatan kepatuhan pada perambuan. Terakhir, penutupan lintasan yang tidak dijaga.”

Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI sepakat bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT KAI, dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dapat meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan perlintasan sebidang. Terutama koordinasi terkait pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam penyediaan fasilitas keselamatan, perawatan dan penertiban perlintasan sebidang. “Karena keselamatan adalah hal yang utama dalam transportasi,” ujar Sudewo, anggota Komisi V. (ian)



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga



JADILAH
PETARUNG
DALAM
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
JALAN

AYO
PEJUANG
JALAN,
KUAT DAN
TANGGUH

"Insan PUPR harus menjadi petarung yang tangguh, kuat, berintegritas, berani dan berjiwa seni. Karena peran kita sebagai petarung dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," tegas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR Tingkatkan Pengawasan Standar Pelayanan Jalan Tol



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk menjamin keselamatan dan keamanan para pengguna jalan tol.

“Kementerian PUPR juga meminta seluruh operator jalan tol untuk meningkatkan patroli rutin untuk menemukan adanya potensi gangguan terhadap pengoperasian jalan tol dan lalu lintas di sepanjang koridor ruas tol sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang berlaku,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian dalam Jumpa Pers di Jakarta, Senin, 19 September 2022.

Hedy menambahkan, Kementerian PUPR juga meminta operator bekerja sama secara intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat di sepanjang koridor tol untuk mengurangi risiko gangguan yang bersumber dari berbagai kegiatan sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi atau bahkan menimbulkan bahaya bagi para pengguna jalan tol.

Hal tersebut menyusul kecelakaan beruntun pada Minggu, 18 September 2022 lalu yang terjadi di Jalan Tol Pejagan-Pemalang KM 253 yang salah satunya dipicu oleh asap tebal akibat pembakaran sawah/ladang/ilalang di pinggir tol. Hedy mengatakan Kementerian PUPR menyampaikan dukacita yang mendalam atas peristiwa kecelakaan beruntun tersebut yang menimbulkan 1 orang korban jiwa dan 19 orang korban luka.

“Kami meminta para BUJT untuk memasang CCTV pada titik-titik rawan ruas tol untuk menangkap peristiwa yang tidak tertangkap petugas patroli. Misalnya lokasi di mana sering terjadi pembakaran lahan akan dipasang CCTV,” kata Hedy.

Dikatakan Hedy, Kementerian PUPR memberikan dukungan penuh kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang sedang melakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab dan kronologi kecelakaan lalu lintas beruntun tersebut.

“Kementerian PUPR mengajak dan mengimbau seluruh pengguna jalan tol untuk senantiasa berhati-hati dalam berkendara dengan mengikuti ketentuan yang berlaku antara lain tidak melampaui batasan kecepatan, tidak menggunakan bahu jalan, tidak menyusul dari kiri, beristirahat saat lelah, menjaga kondisi kendaraan yang mantap, serta memperhatikan rambu lalu lintas dan petunjuk dari petugas di lapangan,” kata Hedy.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, kecelakaan lalu lintas juga sering disebabkan oleh kecepatan tinggi melebihi batas dari para pengguna tol. Untuk itu, Danang mengatakan Kementerian PUPR juga meminta para BUJT untuk memperbanyak pemasangan kamera CCTV dengan kerapatan yang memadai.

“Saat ini sedang dalam proses pemasangan kamera-kamera *monitoring* kecepatan di seluruh ruas tol, termasuk pemasangan kamera CCTV. Kita meminta BUJT untuk memasang *speed camera* untuk memonitor kecepatan,” ujar Danang.

Selain itu, Danang mengatakan BUJT juga diminta untuk memperbanyak pengawasan dan meningkatkan kecepatan reaksi terhadap kondisi-kondisi khusus, semisal dampak asap pembakaran sawah/ladang seperti yang terjadi di ruas Tol Pejagan-Pemalang tersebut.

Hadir pula dalam acara tersebut Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Sekretaris BPJT Triono Junoasmono, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Pantja Dharma Oetojo.

TEKNOLOGI MLFF

Bayar Tol Tanpa Berhenti

Transaksi pembayaran jalan tol dengan teknologi pembayaran non tunai nirsentuh (MLFF) ditargetkan beroperasi di tol yang ada di Pulau Jawa dan Bali pada 2023. Melalui sistem ini pemilik kendaraan tak perlu berhenti saat masuk gerbang tol.

MULTI LANE FREE FLOW (MLFF)

Proses pembayaran nirsentuh jalan tol tanpa berhenti ketika memasuki gerbang tol.

Pemenang lelang
Roatex Ltd. Zrt.

Lama Pengerjaan
12 bulan

Masa Konsesi
10 tahun

Target Beroperasi
2023

Nilai Investasi
Rp. 4,06 triliun

Teknologi
Sistem Satelit
Navigasi Global
(GNSS)

Tahun Mulai
2021

RENCANA TOL IMPLEMENTASI MLFF

1.713 km

Panjang Jalan Tol

41 Ruas Tol

Pulau Jawa dan Bali

• Tol Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Merak, Sukabumi

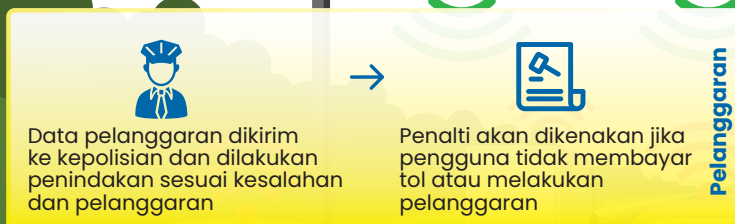
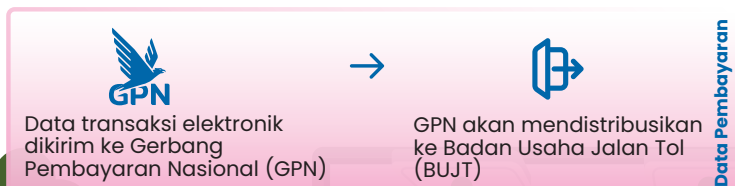
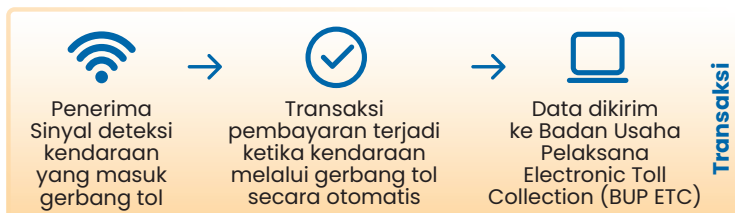
• Tol Trans Jawa
(Jakarta - Cikampek - Semarang - Solo - Surabaya - Pasuruan)

• Tol Jembatan Surabaya - Madura

• Tol Cipularang - Padaleunyi, Soreang

• Tol Mandara, Bali

TAHAPAN PENERAPAN SISTEM



BUP ETC



Implementasinya secara bertahap dimulai pada tahun 2022. Dengan dilaksanakannya sistem transaksi MLFF ini diharapkan bisa memperlancar dan mempercepat arus kendaraan dalam melakukan pembayaran."

Danang Parikesit

Kepala BPTJ
Kementerian PUPR



Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memetakan risiko korupsi dan mencegah korupsi, dengan hasil berupa indeks integritas institusi. Tujuannya agar meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi.

Apa saja yang dinilai?



Transparansi



Pengelolaan SDM



Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa



Sistem Anti Korupsi



Pengelolaan Anggaran



Integritas



Trading in Influence/ Intervensi

Survei ini dilakukan Kepada:



Internal (Pegawai)



Eksternal (Pengguna Layanan/ Stakeholder)



Eksper Bidang Korupsi



Pengaduan Masyarakat ke KPK dan Kepatuhan LHKPN

Hasil Indeks Integritas

Hasil Indeks Integritas Tahun 2021 adalah 82,64%

rata-rata nasional 81,50%

untuk tingkat Kementerian/ Lembaga

sedangkan rata-rata nasional 72,43%

untuk 640 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah

**Semakin Mendekati 100 Risiko Korupsi Semakin Rendah*

Manfaat dari SPI

Institusi: SPI Mampu Memetakan Korupsi dan Membantu Menyusun Kebijakan Antikorupsi

Publik: Masyarakat Mengetahui Fakta Korupsi di Institusi

Jangan lupa untuk berpartisipasi dalam SPI Tahun ini

Ingat Pesan Pak Bas...



4 Big No's

No Bribery!

Tidak ada Suap & Pemerasan

No Gift!

Tidak menerima komisi tanda terima kasih dalam bentuk uang & bentuk lainnya

No Kick Back!

Tidak boleh ada pemberian yang bertentangan dengan aturan & ketentuan yang berlaku

No Luxurious Lifestyle!

Tidak bergaya hidup mewah

Kementerian PUPR Dukung Pemeriksaan Laporan Kinerja oleh BPK

Badan Pemeriksa
Keuangan
Republik Indonesia
(BPK-RI)
menyelenggarakan
Entry Meeting
Pemeriksaan
Atas Kinerja dan
Dengan Tujuan
Tertentu (DTT)
pada Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat (PUPR)
dan Kementerian
Pertanian.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Kegiatan ini berlangsung pada Semester II Tahun 2022 di Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambut baik pemeriksaan tersebut karena dapat meningkatkan kinerja pembelanjaan uang negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada BPK, semua Direktur Jenderal di Kementerian PUPR sudah hadir langsung pada acara hari ini untuk siap membantu Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Pemeriksaan ini membantu kami agar pembelanjaan uang negara semakin baik sesuai aturan-aturan,” kata Basuki.

Apa yang dilakukan BPK ini, tambah Basuki, sangat membantu pihaknya yang selama tahun 2022 mendapatkan banyak tugas khusus. Tugas tersebut dijalankan dengan waktu yang mendesak, sehingga ada potensi terjadi ketidakcermatan dalam prosesnya.

“Semua tugas khusus itu dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden dan sudah kami laporkan ke KPK, BPK, dan Kepolisian agar kami didampingi supaya semua pekerja kami lakukan sesuai koridor,” ujar Basuki.

Di antara tugas khusus tersebut, ada pembangunan infrastruktur untuk mendukung KTT G20 di Indonesia, infrastruktur pendukung di Mandalika, dukungan infrastruktur di Tana Mori untuk ASEAN Summit, dan renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Di kesempatan yang sama, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh mengatakan bahwa salah satu tugasnya adalah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). DTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

“DTT bertujuan untuk menilai kepatuhan program atau kegiatan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” tutur Haerul.

Untuk pemeriksaan pendahuluan DTT dilakukan pada Aset Konsesi Jasa Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol. Kemudian PDTT Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Bina Marga, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Bina Konstruksi.

Tol Serang-Panimbang Buka Akses Wisata Warga Jakarta ke Banten

Pembangunan Tol Serang-Panimbang (Serpan) Seksi 3 (Cileles-Panimbang) merupakan lembaran baru untuk kawasan Banten dalam rangka pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat melakukan Peletakan Batu Pertama Tol Serang-Panimbang Seksi 3 di Pandeglang, Banten, Senin, 8 Agustus 2022.

"Sekarang kalau kita melihat gambaran tol ini merupakan lembaran baru bagi Banten, khususnya pada sektor ekonomi bidang pariwisata, saya harap seluruh jajaran Provinsi Banten harus bisa memanfaatkan hal ini dengan baik," kata Luhut yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Di acara tersebut turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Pariesit.

Sejalan dengan Luhut, Basuki juga melihat tol Serpan ini mampu membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung menjadi primadona destinasi wisata baru bagi warga Jabodetabek. "Mungkin jadi *complementary* kawasan Puncak, yang tadinya lima jam dari Jakarta, kalau sudah ada jalan tol bisa dua jam saja."

Seperti yang diketahui, pembangunan infrastruktur Jalan

Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 km menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terbagi menjadi tiga seksi.

"Dari total tol, sepanjang 26,5 km Serang-Rangkasbitung sudah beroperasi, untuk seksi dua Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 km sedang dalam tahap konstruksi dengan progress lebih dari 30 persen, dan seksi tiga sepanjang 33 km menghubungkan Cileles-Panimbang," papar Basuki.

Proyek pengerjaan tol merupakan bentuk dari kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan pembagian pengerjaan sepanjang 50 km oleh badan usaha, dan sekitar 33 km dibangun oleh pemerintah.

Ke depan, semoga pembangunan Tol Serpan Seksi III yang saat ini proses pembebasan lahan sudah mencapai 83,86%, dapat berjalan lancar. Terkait penyelesaian, Dirjen Hedy optimis bahwa seksi II dan III direncanakan bisa beroperasi bersamaan pada tahun 2024. Penyelesaian dua seksi ini menjadi penting agar kedua seksi tol bisa langsung terkoneksi tuntas sehingga menguntungkan Pemerintah dan BUJT. (ian)

Optimalisasi Anggaran, Dirjen Bina Marga Dorong Penerapan *Value Engineering*



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Infrastruktur jalan dan jembatan punya nilai strategis bagi perekonomian nasional dan menyentuh masyarakat secara langsung. Namun anggaran yang tersedia untuk membangunnya jauh dari ideal. Maka diperlukan penerapan teknologi supaya anggaran yang ada dapat optimal.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian pada kesempatan Conference Value Engineering, yang diprakarsai oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Selasa, 27 September 2022. “Ada cara yang lebih hemat dalam melaksanakan pekerjaan jalan sehingga tidak menghamburkan anggaran untuk items yang tidak substansial.”

Cara yang dimaksud Hedy adalah menerapkan *value engineering* (VE) atau umum disebut rekayasa nilai pada proyek konstruksi jalan. VE merupakan proses pengambilan keputusan berbasis tim multidisipliner yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai nilai terbaik suatu proyek dengan menjaga kualitas fungsi dan kinerja yang dibutuhkan. Dengan kata lain VE bertujuan mencapai pola atau cara membangun infrastruktur jalan dengan biaya paling efisien tanpa mengurangi kualitas.

Implementasi kajian VE bisa diterapkan pada seluruh siklus hidup proyek, mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, hingga pembongkaran. Hedy berharap kajian VE membawa perubahan cara berpikir dalam proses mengambil keputusan di sepanjang bisnis proses

pekerjaan infrastruktur jalan oleh Ditjen Bina Marga.

Guna meningkatkan implementasi kajian VE, tahun ini Ditjen Bina Marga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 11/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekayasa Nilai dan Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekayasa Nilai. Menurut Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Nyoman Suaryana, sejak 2018 pihaknya telah melakukan tujuh studi dan 20 mini *workshop* terkait implementasi VE.

Pada praktiknya, Ditjen Bina Marga telah menerapkan kajian VE pada beberapa proyek. Beberapa di antaranya adalah proyek pembangunan jembatan layang Joglo dan Cangkung di Jawa Tengah serta Jembatan Enang-enang di Aceh. VE juga diterapkan pada pembangunan jalan layang Sekip di Palembang yang berhasil memangkas biaya konstruksi hampir 50% menjadi Rp152,94 miliar.

Melihat besarnya kontribusi VE, maka Hedy berharap kajian VE mampu mereduksi items pekerjaan yang nantinya malah mubazir. “Kita punya anggaran jangan dihambur-hamburkan begitu saja untuk kegiatan yang tidak penting. Ini bukti nyata adanya peningkatan *good governance* juga,” tutup Hedy. (ian)

Perbaiki Jalan *Bypass* Banjarmasin Menggunakan Teknologi Kearifan Lokal

Preservasi atau perbaikan Jalan Bypass Banjarmasin di Kalimantan Selatan (Kalsel) menggunakan teknologi berbasis kearifan lokal.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Teknologi yang dimaksud adalah menggunakan Cerucuk Galam yang dipancang sebagai bagian dari pondasi konstruksi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalsel Syaqui Kamal kepada para jurnalis di Banjarmasin, Jumat, 7 Oktober 2022.

Sejumlah titik konstruksi preservasi dipancarkan Cerucuk Galam sepanjang 4,7 m dengan jarak 25 cm. Hal tersebut dilakukan karena kondisi jalan yang berdiri di lahan gambut dengan kondisi muka air cukup tinggi.

Kayu pohon Galam banyak tumbuh di area gambut Banjarmasin dan menjadi teknologi kearifan lokal. Banyak penduduk setempat memanfaatkan kayu Galam sebagai pondasi bangunan. Menurut Syaqui, pengaplikasian cerucuk kayu Galam ini jauh lebih singkat dan lebih murah dibandingkan metode PVD atau *Prevabricated Vertical Drain*.

PVD sendiri telah digunakan di konstruksi Tol Trans Jawa. "Kita tanam di bawah, lalu kita kasih timbunan dan *geotextile*. Kemudian kita jadikan badan jalan di atasnya," jelas Syaqui.

Jalan Bypass Banjarmasin atau yang bernama resmi Simpang Handal Bakti (Simpang Serapat) ini mendapat perbaikan setelah dilanda banjir hebat pada awal 2022. Jalan ini dinanti banyak orang karena menjadi jalur yang sangat penting untuk pergerakan barang logistik. "Pekerjaan *Bypass* Banjarmasin ini sudah hampir rampung dengan progres riil 94,5 persen."

Dengan demikian, lanjut Syaqui, perbaikan jalan sudah bisa selesai di akhir tahun 2022. Pekerjaannya sendiri menggunakan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp191,8. Anggaran tersebut mencakup pekerjaan jalan sepanjang 27 km yang terdiri dari rehabilitasi mayor 419 m, rehabilitasi minor sepanjang 3,2 km, rekonstruksi 3,2 km, peningkatan struktur tanpa penutup 2,07 km, dan pelebaran jalan menuju standar sepanjang 11,3 km.

Meski ruas ini belum pernah dilanda banjir selama 35 tahun terakhir, PT Wijaya Karya dan PT Pandji KSO selaku pelaksana konstruksi akan meninggikan sejumlah titik di ruas jalan ini, menambah *drainase*, serta memaksimalkan aliran sungai yang terdekat. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi potensi banjir di kemudian hari. (ian)

Menteri Basuki Minta Jaga Kualitas Jalan Tol Jagat Kerthi Gilimanuk-Mengwi



Foto: Dok. Difjen Bina Marga

Bali bakal mempunyai jalan tol baru setelah pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 km dimulai. Diharapkan pembangunan ini selesai pada 2028.

Namun demikian, proyek senilai Rp24,6 triliun itu diminta oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk selesai pada akhir tahun 2025. Hal pertama yang diminta Basuki adalah jalan yang berkualitas dan indah.

"Pertama, pasti kualitas. Sebagai wisata dunia, Bali harus menunjukkan kalau kita bisa membangun jalan tol dengan kualitas terbaik. Lalu, kedua juga harus memperhatikan

estetika. Tidak hanya struktur-struktur jalan saja. Juga, kualitas dan estetikanya, tanpa mengurangi kecepatan kerjanya," tegas Basuki saat peletakan batu pertama (*groundbreaking*) bersama Gubernur Bali I Wayan Koster di Pekutatan, Jembrana, Sabtu, 10 September 2022.

Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi terbagi menjadi 3 Seksi. Dengan Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.

Proses pembangunan jalan tol ini tetap memperhatikan kearifan lokal Bali dengan menghindari tempat-tempat suci serta membangun jalur khusus roda dua untuk sepeda dan sepeda motor. "Saya sangat gembira karena akan ada jalur untuk pengendara sepeda motor dan sepeda. Ini merupakan salah satu perhatian kita pada *social heritage* di Bali, sehingga cepat sampai tujuan dengan selamat sambil menikmati keindahan alam di Jembrana, Tabanan dan Badung," tambah Basuki.

Di kesempatan yang sama Koster mengapresiasi proyek ini sekaligus mengakui bahwa jalan tol tersebut akan memberikan dampak besar terhadap keseimbangan pembangunan dan perekonomian di seluruh Bali. Bahkan, dia meyakini jalan tol tersebut akan mampu menjadi pemicu timbulnya destinasi wisata baru.

"Jalan Tol Jagat Kerthi Bali mengandung makna yang memberi kesejahteraan dan kebahagiaan untuk masyarakat Bali yang diyakini akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Bali dalam peningkatan investasi pembangunan," katanya.

Adapun Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi akan dibangun melintasi 3 Kabupaten, 13 Kecamatan dan 58 Desa. Dengan pemberdayaan 4 Desa di Bali sebagai *rest area* terpadu yang masing-masing memiliki konsep berbeda.

Jalan tol ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan ruas arteri nasional dan mempersingkat waktu perjalanan menuju Denpasar yang awalnya bisa sekitar 5-7 jam dapat menjadi sekitar 1,5-2 jam saja.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit menambahkan bahwa Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini nantinya akan dilengkapi pula dengan sistem *Multi Lane Free Flow* (MLFF). (May)



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Presiden Resmikan Tol Cibitung-Cilincing dan Serpong Balaraja Seksi I

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dan Tol Serpong-Balaraja Seksi I pada Selasa, 20 September 2022.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Presiden berharap peresmian dua ruas tol ini dapat membantu mempermudah distribusi produk hasil industri dan membantu mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Tol Cibitung-Cilincing dan Tol Serpong-Balaraja Seksi I yang segera bisa kita operasionalkan," kata Presiden, yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Tol Cibitung-Cilincing yang diresmikan kali ini merupakan bagian dari ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) atau Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi 2. Kedua ruas tol lingkar luar tersebut melengkapi struktur jaringan jalan tol pada kawasan metropolitan Jabodetabek yang berfungsi untuk mendukung mobilitas barang dan jasa ke *outlet* utama di Tanjung Priok, serta mengurangi kemacetan.

Kehadiran Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 27,2 km ini bisa mempercepat mobilitas barang yang berasal dari kawasan industri dan kawasan logistik yang tersebar di Karawang dan Bekasi menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara.

"Kecepatan inilah yang nanti akan mempermudah

mobilitas barang dan jasa, serta memperkuat daya saing produk-produk Indonesia yang akan diekspor," papar Presiden.

Sementara itu, untuk ruas Tol Serpong-Balaraja Seksi 1, Presiden menyebutkan merupakan bagian dari ruas Tol JORR III untuk pembangunan tahap awal. Ruas Tol Serpong-Balaraja Seksi 1 yang diresmikan ini memiliki panjang 5,1 km. Apabila ruas Tol JORR 2 dan Tol JORR 3 sudah selesai, maka secara keseluruhan dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

"Kalau JORR 2 dan JORR 3 selesai dari barat ke timur, timur ke barat tidak perlu lagi melalui tengah Jakarta. Sehingga bisa mengurangi kemacetan di DKI Jakarta," ujar Presiden.

Hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Budi Harimawan Semihardjo, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta – Jawa Barat Wilan Oktavian. (Tri)

Ini Dia Teknologi Canggih di Proyek Tol Pekanbaru-Bangkinang 40 Km

Konstruksi pembangunan Tol Pekanbaru-Bangkinang sudah selesai 100% dan menunggu untuk diresmikan serta bisa dilalui kendaraan. Namun demikian, ruas yang menjadi bagian dari Ruas Pekanbaru-Padang Tol Trans Sumatera itu sudah sempat dibuka beberapa hari saat arus mudik dan arus balik lebaran Idul Fitri 2022.

Tol Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 40 km merupakan koridor pendukung atau sirip dari ruas tol Pekanbaru-Padang sepanjang 254 km. Ruas ini memiliki *main road* sepanjang 40 km serta 6 jembatan dan 2 rest area.

Menurut catatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), jalan tol ini punya kekhasan pada penerapan teknologi pembangunannya. Pembangunan infrastruktur pada Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang mengimplementasikan teknologi *Building Information Modelling* (BIM). Dengan

begitu proses konstruksi menjadi lebih efektif.

"Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh sejumlah orang dalam waktu tertentu bisa dikerjakan menggunakan sistem BIM dalam waktu yang relatif lebih singkat," menurut sumber BPJT.

Berdasarkan laman Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BIM adalah representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional suatu bangunan (atau obyek BIM).

Karena itu, di dalamnya terkandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan tersebut yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam kurun waktu siklus umur bangunan, sejak konsep hingga demoli.

BIM adalah pendekatan baru, melibatkan proses perancangan dan pembuatan aset bangunan menggunakan representasi 3D dari atribut fisik dan fungsional. BIM merujuk pada proses membuat data set digital yang membentuk model 3D dan informasi yang melekat pada model tersebut dalam sebuah lingkungan kolaborasi yang disebut *Common Data Environment* (CDE).

Prinsip BIM bukan sekadar proses singular atau pembuatan model 3D dengan bantuan komputer semata, melainkan proses pembuatan model dan data secara bersamaan dan dikolaborasikan antar para pelaku sejak proses perencanaan, perancangan, fabrikasi, hingga pembangunan dan pemeliharaan.

Dalam BIM, para *stakeholder* (yang terdiri dari pemilik pekerjaan, arsitek, kontraktor, engineer) saling bekerjasama. Mereka secara efisien bertukar informasi (baik data maupun geometri), berkolaborasi dalam mengefisienkan proses pembangunan/konstruksi sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses konstruksi. *Output*-nya adalah menghasilkan pengoperasian bangunan yang lebih mudah dan meminimalisir produksi limbah sekaligus mengeluarkan biaya yang lebih murah.

Implementasi BIM di proyek Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang telah dilaksanakan dalam perencanaan *main road*, struktur (*overpass*, *underpass*, jembatan, *box traffic*, *box drain*), simulasi scheduling hingga perhitungan *cost estimating*.

Selanjutnya implementasi BIM yang ada di lapangan digunakan pada beberapa pekerjaan yakni menggunakan gambar kerja yang merupakan *output* dari BIM, dibandingkan sebelumnya yang masih menggunakan gambar manual.

Inovasi teknologi BIM merupakan representasi rencana bangunan aktual yang dituangkan secara digital berbentuk tiga dimensi dan animasi yang dapat dilihat menggunakan *Virtual Reality* (VR). Dengan menggunakan model 3D ini, informasi yang digunakan pada teknologi BIM sebagai landasan untuk *stakeholder* melakukan *decision making* dalam setiap tahapan konstruksi.

Dengan menggunakan BIM dan *platform* CDE, proses *approval* dokumen dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selanjutnya teknologi BIM juga sudah dapat digunakan sebagai pembanding antara perencanaan dengan realisasi di lapangan baik dari segi volume pekerjaan, biaya, maupun penjadwalannya.

Salah satu contoh yakni pada proses pembuatan gambar kerja struktur jembatan, perhitungan volume beton dan tulangan, tahapan pekerjaan, dan perhitungan volume. Dengan menggunakan BIM, pekerjaan *highway* dengan panjang penanganan 5 km yang dikerjakan oleh 1 orang dapat diselesaikan 15 hari, mulai dari gambar kerja sampai dengan perhitungan volume.

Manfaat lainnya yakni terdapat pada perhitungan volume yang jauh lebih teliti dan akurat karena sistem tersebut mampu membaca suatu bentuk secara detail sesuai dengan model rencana. Dengan begitu implementasi BIM dalam membangun jalan tol akan memangkas waktu pekerjaan dan juga biaya.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga



Ekonomi Warga Desa di Jombang Terangkat Setelah Jembatan Gantung Mbah Buto Selesai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Gantung Mbah Buto di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Jembatan gantung ini membuka akses bagi masyarakat antara Desa Ngrimbi dan Desa Penggaron, serta akses wisata air yakni Dam Mbah Buto yang berada di sebelah jembatan.

"Hadirnya jembatan gantung akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Di kesempatan terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali David Rachmat Prabowo mengatakan, Jembatan Gantung Mbah Buto membentang di atas Sungai Seloemboeng dengan panjang 60 m. Jembatan ini merupakan bagian dari paket pekerjaan pembangunan tiga unit jembatan gantung pada 2020-2021.

Ketiga unit itu meliputi Jembatan Gantung Mbah Buto, Jembatan Gantung Kaliregoyo di Kabupaten Lumajang, dan Jembatan Gantung Ngares di Kabupaten Trenggalek yang

menelan anggaran Rp17 miliar. "Untuk Jembatan Mbah Buto mulai kontrak November 2020 dan sudah selesai Juni 2021 dengan nilai kontrak Rp2,8 miliar," ujar David.

Konstruksi jembatan gantung berupa rangka baja simetris yang dilengkapi struktur *fondasi strauss pile* diameter 40 cm dengan mengandalkan *sling hanger* sebagai perkuatan pada lantainya. Menurut dia, Jembatan Gantung Mbah Buto dikhususkan untuk warga yang berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor roda dua.

Jembatan ini tidak boleh dilewati oleh kendaraan roda 4, kecuali dalam keadaan darurat untuk ambulans. "Jembatan ini diperkirakan memiliki usia konstruksi sekitar 50 tahun dengan catatan pemeliharannya baik," papar David.

Kehadiran Jembatan Gantung Mbah Buto diakui Kepala Desa Penggaron Riko Ret Hendrik sangat membantu warganya. Dengan selesainya pembangunan jembatan ini maka dapat membantu aksesibilitas dan mobilitas warga di Desa Penggaron, khususnya untuk warga RT 01 RW 002.

"Sebelumnya warga kami di RT 01 RW 002 merasa dikucilkan, lokasinya terisolir karena berseberangan dengan sungai," katanya.

"Selanjutnya kami mengusulkan dibangun jembatan penghubung dan sekarang justru jembatan ini menjadi akses warga desa yang ada di seberang sungai seperti Desa Ngrimbi," imbuhnya.

Ketua RT 01 RW 002 Desa Penggaron Setyowati menambahkan, adanya Jembatan Gantung Mbah Buto membuat warga yang tinggal di sisi barat Sungai Seloemboeng tak perlu menyeberangi sungai. Sebab, sebelumnya warga harus menyeberangi sungai saat musim kemarau dan berjalan memutar sekitar satu jam apabila muka air sungai tinggi.

"Sekarang kalau ke Pasar Mojoduwur untuk belanja atau menjual hasil pertanian hanya 15 menit. Anak-anak kami juga lebih cepat kalau berangkat sekolah," tutup Setyowati.

Jembatan Shortcut Yeh Otan Untuk Tingkatkan Konektivitas Denpasar-Gilimanuk



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil menyelesaikan pembangunan Jembatan Shortcut sepanjang 277 m di atas Sungai Yeh Otan Bali.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hingga saat ini, progres fisik konstruksi jembatan Shortcut Yeh Otan mencapai 83,79%. Ia menjelaskan, jembatan ini dibangun sebagai jalan pintas yang menghubungkan dua Desa di Kabupaten Tabanan, Desa Bajera (Kecamatan Selemadeg) dan Desa Antosari (Kecamatan Selemadeg Barat).

Langkah ini dilakukan guna mengurangi jalur yang menjadi daerah titik rawan kecelakaan. Selain itu, untuk meningkatkan konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keamanan dan keselamatan pengendara.

"Akses jalan yang semakin baik juga akan menunjang perekonomian masyarakat sekitar," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Agustus 2022.

Basuki mengatakan pembangunan jembatan Shortcut Yeh Otan dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021-2022.

Jembatan ini, kata Basuki, dibangun untuk mempersingkat jarak tempuh dari Denpasar ke

Pelabuhan Gilimanuk dan mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi di jalur tenggorok ruas jalan Bajera-Antosari.

Selain itu, pembangunan jembatan ini akan mendukung peningkatan kelancaran konektivitas jalur wisata di Pulau Dewata karena di sekitar lokasi jembatan terdapat lokasi wisata seperti Pantai Loka, Belimbing Rice Terrace hingga Air Terjun Sing-Sing.

"Pembangunan Jembatan Denpasar-Gilimanuk (TK. Yeh Otan) konstruksinya dilaksanakan oleh kontraktor PT Modern Surya Jaya dan PT Pramana Arta Raharja, KSO senilai Rp 59 miliar dan konsultan supervisi PT Tata Guna Patria, PT Eskapindo Matra dan PT Gaharu Sempana," ujarnya.

Adapun jembatan shortcut Yeh Otan merupakan shortcut keempat yang dibangun di Jalur Utama Denpasar-Gilimanuk wilayah Tabanan. Sebelumnya, telah rampung dibangun tiga shortcut pada 2014.

Konten Media Sosial Ditjen Bina Marga **Harus Kredibel**



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Ditjen Bina Marga mengadakan *workshop* untuk meningkatkan ekosistem media sosial di kalangan internal supaya kontennya lebih menarik dan informatif.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Bagian Hukum & Komunikasi Publik (Kompu). Kegiatan bertajuk Workshop Peningkatan Pengelolaan Media Sosial: “Kredibel Bermedia Sosial ala Ditjen Bina Marga” berlangsung di Kota Batu, Jawa Timur, 23-24 Agustus 2022.

Mewakili Sekretaris Ditjen Bina Marga, Kabag Hukum & Kompu, Ande Akhmad Sanusi mengungkapkan gencarnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan belakangan ini memerlukan dukungan serta publikasi yang masif. “Maka Humas Pemerintah harus mampu mensosialisasikan kemajuan pembangunan pemerintah serta menebar pesan positif kepada masyarakat,” kata Ande.

Untuk itu, ia menghimbau supaya elemen humas Bina Marga bisa mengemas pesan dan menyampaikannya kepada masyarakat secara kredibel, baik, menarik, serta tepat sasaran. “Tidak ada informasi yang “One Size Fits All”, sehingga dibutuhkan kreativitas dalam mengolah pesan, memiliki pengetahuan akan target *audience*, dan juga memilih kanal yang sesuai,” ujar Ande.

Menurut data monitoring dan evaluasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Tahun 2022 terhadap Media

Sosial Ditjen Bina Marga tingkat pusat maupun balai, terungkap bahwa persepsi pada brand Tier II Bina Marga sudah baik. Akun Instagram Bina Marga dinilai telah menampilkan pesan edukatif dan informatif, tidak kaku, ringan, *storytelling*, *brand identity*, serta *explore* fitur-fitur dan pengemasan visual.

Meskipun begitu, Media Sosial Ditjen Bina Marga Tier III masih perlu peningkatan pada sejumlah hal, di antaranya konten interaktif dan edukatif, kurang *explore tap in trend*, variasi konten, admin kurang responsif, foto kualitas rendah, serta belum memiliki strategi komunikasi yang terstruktur.

Para peserta diharapkan lebih memahami bagaimana menebar optimisme, saling menginspirasi, dan terus berkolaborasi dalam setiap konten agar reputasi Direktorat Jenderal Bina Marga semakin positif.

Selama dua hari, 50 peserta *workshop* diberi pelatihan manajemen isu dan membuat perencanaan konten media sosial. Para peserta merupakan Petugas Komunikasi Publik dari balai khusus, Balai/Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional di seluruh Indonesia dan Badan Pengatur Jalan Tol. (lan)

Flyover Kopo Berhasil Urai Kemacetan Setelah Resmi Beroperasi



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Jembatan layang atau *flyover* Kopo di Bandung Jawa Barat resmi beroperasi pada Sabtu, 1 Oktober 2022. *flyover* sepanjang 1,3 km ini berhasil mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan perempatan Cibaduyut - Soekarno Hatta dan Jalan Kopo - Soekarno Hatta.

Setelah proses uji kelaikan, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bandung, Khairur Rijal menyebut antrean kendaraan di kaki simpang Jalan Cibaduyut - Leuwipanjang - Soekarno Hatta jauh lebih lancar jika dibandingkan sebelum *flyover* beroperasi.

“Berdasarkan data, panjang antrean kendaraan di kaki simpang sebelum adanya *flyover* ini berkisar di angka 50 sampai 100 m. Dan setelah uji kelaikan, *flyover* ini difungsikan, relatif tidak ada antrean kendaraan atau kemacetan di kaki simpang di jam padat kendaraan,” ujarnya saat meresmikan *Flyover* Kopo untuk beroperasi.

Flyover Kopo dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat

Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk memperlancar konektivitas jalan nasional dan jalan tol. Menurut Kepala BBPJN Jakarta – Jawa Barat Wilan Oktavian, pembangunan *Flyover* Kopo dimulai pada November 2020 dengan nilai kontrak Rp288,76 miliar yang dananya berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Seluruh proses pembangunan rampung minggu pertama September 2022. Untuk kemudian dilakukan serah terima sementara pekerjaan *provisional hand over* (PHO). *Flyover* ini memiliki panjang 1,3 km dan lebar 18 m yang terdiri dari 4 lajur dan 2 jalur. Konstruksi *flyover* memiliki dua tipe gelagar type PCU Girder bentang 46 m dan type PCI Girder bentang 43 m dengan pondasi yang di gunakan tipe *bore pile* diameter 1.2 m.

Flyover Patih Galung Diharapkan Bisa Atasi Kemacetan di Kota Prabumulih



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan jalan layang atau *flyover* di Kota Prabumulih, Sumatra Selatan.

Pembangunan ini penting untuk mengatasi kemacetan yang terjadi akibat adanya perlintasan sebidang rel kereta api di Jalan Jenderal Sudirman, Patih Galung, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Konstruksi *flyover* dikerjakan sejak terbit Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 24 Mei 2021 dan ditargetkan selesai November 2022. Berdasarkan data progres fisik, pembangun *Flyover* Patih Galung hingga minggu ke 64 bulan Agustus telah mencapai 77,7%.

Diharapkan pembangunan *Flyover* Patih Galung selesai lebih cepat dari rencana akhir November 2022. Dengan demikian, warga di sekitar Prabumulih dapat merasakan peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Konstruksi *Flyover* Patih Galung memiliki total panjang efektif 382,35 m yang terdiri dari 6 span dan 2 oprit lebar dengan lebar hingga tepi luar jembatan 21,20 m. Selain itu *flyover* memiliki lebar lajur 3,5 m, bahu jalan luar 1,5 m, dan lantai jembatan beton bertulang Fc 30' tebal 23 cm dengan perkerasan *rigid pavement* 28,5 cm. Pembangunan dikerjakan oleh kontraktor PT. Ricky Kencana Sukses Mandiri dengan biaya Rp86 miliar.

Untuk mendukung keselamatan pengendara, reananya *Flyover* Patih Galung dilengkapi lampu penerang dengan jarak tiang sekitar 25 m mulai dari awal oprit hingga ujung oprit. Ornamen bangunan *flyover* juga akan memperhatikan aspek beautifikasi dengan mengedepankan seni dan budaya lokal Prabumulih.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Mengucapkan
Selamat & Sukses
Atas Pelantikan



**Pengurus
Himpunan Pengembangan
Jalan Indonesia (HPJI)**
Periode 2019 – 2023



**Saat kamu
mempunyai
informasi
Jalan atau
Jembatan
Nasional
Rusak**

kami mempunyai
pelayanan aduan
di aplikasi

 **Jolon Kito**^{2.0}

Mewujudkan Jalan yang Lebih Baik

Unduh segera di

